

Peran Zakat Dan Wakaf Sebagai Alternatif Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**Inne Risnaningsih**

Prodi Ekonomi Syariah Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Email: inne_risnaningsih@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran zakat dan wakaf terutama wakaf uang sebagai salah satu alternative untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature. Berdasarkan hasil penelitian menemukan adanya pengaruh implementasi zakat dan wakaf uang terhadap penurunan tingkat kemiskinan bagi penerima nya walaupun masih dalam level mikro ,karena adanya keterbatasan data dan kontribusi zakat maupun wakaf masih relative kecil dibandingkan dengan perekonomian nasional. Hal ini disebabkan belum terintegrasinya pengelolaan zakat dan wakaf terhadap kebijakan perekonomian nasional.

Kata Kunci: Peran Zakat, Peran Wakaf, Kesejahteraan Masyarakat**ABSTRACT**

This research aims to eksplained about zakat role and waqf especially money waqf as the alternative to improving social welfare. This research conducted is a descriptive qualitative study with the literature study. Based on research result state that to effect the zakat and waqf toward poored increasing to ower.given but on micro level,because that date limited and zakat and waqf contribution is small relative as more than Nasional economic. It is because still to integrated management zakat and waqf toward economic nasional polic.

Keywords: Role of Zakat, Role of Waqf, Community Welfare**PENDAHULUAN**

Diskusi dan Penelitian mengenai peran zakat maupun wakaf terhadap pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan, terutama di Negara Negara muslim mayoritas penduduknya. Secara umum hasil penelitian berbagai penelitian menemukan adanya pengaruh implementasi zakat maupun wakaf terhadap penurunan tingkat kemiskinan bagi penerima zakat, namun sebagian besar hasil penelitian mengenai pengaruh zakat pada level mikro, karena adanya keterbatasan data dan kontribusi pembayaran zakat maupun wakaf yang masih relatif kecil dibandingkan perekonomian nasional. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya pengelolaan zakat maupun wakaf terhadap kebijakan perekonomian secara Nasional suatu Negara atau pengelolaan zakat dan wakaf yang belum memenuhi tata kelola yang baik. Walaupun pengelolaan antara zakat dan Wakaf berbeda, tetap mempunyai misi yang sama yaitu mengentaskan kemiskinan atau menciptakan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian pembahasannya dalam hal ini perlu dibedakan.

Meskipun tidak ada keseragaman antara ahli maupun negara didalam mengukur tingkat kemiskinan, namun mereka memiliki perhatian yang sama tentang perlunya upaya mengentaskan kemiskinan, setidaknya ada tiga aspek yang diperlukan, yaitu:

1. Harus adanya ukuran kesejahteraan yang relevan dan jelas.
2. Harus ditentukan garis batas kemiskinan yang merupakan ambang batas bawah rumah tangga atau individu tertentu yang akan digolongkan miskin.
3. Harus dipilih indicator kemiskinan yang akan digunakan untuk pelaporan populasi atau untuk subkeompok penduduk saja

Berdasarkan perkembangan keilmuan, indicator kemiskinan saat ini tidak hanya melibatkan aspek daya beli atau ekonomi namun telah bersifat multidimensi. Indeks kemiskinan multidimensi global atau *Multidimensional Poverty Index (MPI)* diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 2010 oleh UNDP Bank Dunia dan *Oxford Poverty & Human development Institute*, Index ini mengoreksi index kemiskinan sebelumnya yang bersifat parsial sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam pengukuran. Index ini merupakan gabungan dari tiga Dimensi:

1. Dimensi Kesehatan diukur dari tingkat nutrisi dan tingkat kematian anak
2. Dimensi pendidikan diukur dari lama studidan jumlah anak yang bersekolah
3. Dimensi standar hidup diukur dari pengeluaran bahan bakar. Listrik, air, kepemilikan asset dan sebagainya.

Hingga pertengahan tahun 2015, ditemukan kemiskinan yang cukup tinggi, diantaranya;

1. Sekitar 1,6 milyar orang hidup dalam kondisi kemiskinan multidimensi, 54% hidup di Asia Selatan dan 31% di sub sahra Afrika.
2. Sebagian besar orang miskin multidimensional 70% tinggal di Negara berpendapatan rendah

Terdapat perbedaan hasil pengukuran dengan MPI dan pendekatan garis pendapatan absolute (misalkan minimal \$1,25 per haripada beberaa Negara seperti Chad dan Ethiopia yang tampak tidak begitu miskin jika diukur secara absolute dengan jumlah penduduk miskin 35%, namun jika diukur dengan MPI naik kemiskinannya menjadi 87%

Hampir setengah dari semua orang miskin MPI hidup dengan kondisi kesusahan yang ekstrim, seperti gizi buruk atau berpendidikan kurang dari 1 tahun jumlah mereka hampir mencapai 736 juta orang.

Dengan indicator MPI, dapat diungkap terdapat pola kemiskinan berbeda antar wilayah regional. MPI tidak jumlah penduduk namun mampu melihat sebrapa serius kemiskinan tersebut atau pad aspek apa saja kemiskinan terjadi pada seluruh aspek, maka mereka bisa dikatakan pada atau sangat miskin atau melarat.

Lebih jelasnya dapat dilihat tabel di berikut ini :

Tabel 1.1 Index kemiskinan regional tahun 2015:

Katagori (Jumlah orang)	MPI	% penduduk miskin MPI	Persen penduduk miskin MPI (Juta)	Jumlah total penduduk (juta)
Eropa dan Asia tengah	0,008	2,1	3,0	152,3
Amerka latin dan karibia	0,022	5,2	26,0	499,3
Asia Timur dan pasifik	0,031	7,1	134,8	1889,6

Negara Negara arab	0,109	20,7	54,4	263,3
Asia Selatan	0,275	52,5	844,0	1607,5
Sub Sahara Afrika	0,343	61,1	496,0	811,5

Sumber: [www. Opini.org.id](http://www.Opini.org.id)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan multidimensi tertinggi di wilayah Afrika diikuti wilayah Asia selatan dan Negara-negara Arab .Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kemiskinan terdapat di Negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim yang sebagian besar ada di tiga wilayah tersebut. Secara umum lebih banyak penduduk miskin jika diukur dari MPI dibandingkan dengan US\$ 1,25/ hari

Kemiskinan merupakan problem utama dalam pembangunan di Indonesia, hingga saat ini. Integrasi program penurunan tingkat kemiskinan telah menjadi bagian dan agenda pembangunan nasional Indonesia sejak negeri ini merdeka. Dengan Program Pengelolaan zakat dan wakaf yang efektif ini secara umum tingkat kemiskinan di Negara ini semakin menurun .akan tetapi rendahnya tingkat kemiskinan itu ada keterkaitan dengan pengukuran dan indicator yang digunakan. Di Indonesia terdapat beberapa institusi yang mengukur kemiskinan yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan BKKBN ,adapun pendekatan yang digunakan BPS adalah Kebutuhan fisik dasar minimum dengan objek individual sedangkan BKKBN menggunakan pendekatan multidimensi dengan objek Keluarga.

Menurut BPS tingkat kemiskinan di Indonesia secara umum mengalami penurunan ,peningkatan kemiskinan sempat terjadi ketika mengalami krisis moneter tahun 1997-1998 yakni dari 34 juta orang menjadi 50 juta orang miskin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature dengan menggunakan buku-buku serta literatur lainnya sebagai objek utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Islam tentang Kemiskinan

Tidak sedikit orang-orang yang secara salah memahami kemiskinan dalam pandangan Islam. Mereka menganggap bahwa Islam identik dengan kemiskinan ,bahkan sebagian dari mereka sendiri berpandangan bahwa muslim harus miskin. Mereka mempunyai argument seperti ini karena mereka berpandangan bahwa orang kaya akan mudah tergelincir untuk berbuat dosa mengingat dengan hartanya orang kaya bisa berbuat apa saja, sehingga yang harus dipilih oleh mereka adalah kemiskinan karena itu sarana penyucian diri. Menurut kamus bahasa Indonesia, pengertian fakir miskin adalah orang yang sengajamembuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan bathin.

Dalam AlQuran(Q:93 Ad Dhuha) adalah: *"Bukanlah Allah telah mendapatimu dalam keadaan miskin kemudian Dia menganugrahkanmu kecukupan"* ini maknanya adalah bahwa Allah tidak ingin mempertahankan seseorang untuk tetap dalam keadaan miskin, melainkan Allah ingin memperbaiki nasib seseorang (selama orang tersebut berusaha). Apabila Islam menginginkan kemiskinan ,maka tidak mungkin Allah

menganugerahkan kecukupan ,sebagaimana tertuang dalam surat Ad Dhuha. Di dalam Al Quran kata kata yang sering muncul dalam kaitannya dengan kemiskinan adalah fakir dan miskin, misalnya pada QS At Taubah (9):60 tentang pembagian golongan yang layak menerima zakat. Menurut berbagai pendapat para ulama *Fuqoro* adalah mereka ang tidak punya apa-apa dan bergantung kepada uluran tangan orang atau pihak lain untuk melangsungkan hidupnya. Ini disebabkan karena beberapa hal, misalnya secara fisik tidak ngkinkan untuk bekerja karena cacat tubuh atau karena faktor usia misalnya kakek atau nenek yang sudah tua tidak cukup kuat utuk bekerja, maka mereka berharap uluran tangan dari orang lain. Sedangkan *miskin (masakin-plural)* para ulama berpendapat adalah sebagai golongan masyarakat yang kekurangan dalam menyambung hidupnya. Mereka masih bekerja dan memperoleh pendapatan tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan dasar keluarganya. Masyarkat yang termasuk kategori miskin ini masih memiliki harga diri untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan hidupnya bukanlah orang-orang yang suka meminta-minta..

Walaupun mereka kekurangan dan tidak suka meminta –minta, tetapi bukan berarti bahwa kita membiarkan mereka melanjutkan hidupnya dengan serba kekurangan, melainkan justru hal ini merupakan jalan sedekah bagi masyarakat yang mampu, untuk berinisiatif memberikan bantuan kepada mereka,sebagaimana dianjurkan Rosulullah untuk membantu mereka, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Muslim: *“Barangsiapa yang membantu menghilangkan satu kesusahan dari seorang mukmin di dunia, Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan pada hari kiamat”* Hadist lainnya memerintahkan untuk mencintai orang-orang miskin,diriwayatkan oleh Turmudi” *Wahai Aisyah cintailah orang miskin dan dekatlah dengan mereka karena Allah akan dekat denganmu pada hari kiamat”*. Meskipun demikian dalam tafsir QS Al Baqarah(2):273 , Allah memerintahkan kepada fakir miskin untuk menahan diri dari meminta-minta kecuali dalam keadaan benar-benar terpaksa (Al-Baqarah ayat 273).

Terlepas dari apapun definisi yang digunakan tentang fakir dan miskin, pada intinya adalah kedua kelompok tersebut layak dibantu. Secara esensi, fakir dan miskin adalah sama dengan penyaluran zakat. Bahwa kedua golongan ini adalah sasaran utama zakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, papan dan pendidikan (Mughniyah, 2006:191).

Adapun fakir dan miskin, menurut pandangan berbagai mazhab, para ulama, berbeda pendapat tentang arti fakir dengan miskin. Meskipun memiliki kesamaan, bahwa keduanya adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan seperti zakat (QS At-taubah [9]: 60), namun Maliki menyatakan bahwa miskin lebih susah daripada fakir (QS Al-Balad [90]:16). Kata miskin berasal dari kata sukun, yang artinya diam atau tinggal. Artinya, seseorang tersebut tidak mampu bekerja, sehingga tidak memiliki harta dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Adapun fakir artinya faqarat al-zahri, patah tulang punggungnya, maksudnya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meski ia memiliki mata pecaharian.

Adapun Syafiiyah dan Hanabilah serta sebagian ulama Malikiyah, seperti Ibn Hazm, Ibn Baz, dan Ibn Utsamin dan lajnah al-Daim berpendapat, bahwa fakir lebih berat daripada miskin. Argument ini terbangun dari QS At-Taubah [9]:60, yang memulai awal ayatnya dengan “innama” yang memiliki pemahaman lebih penting dan lebih utama untuk mendapatkan sedekah hingga terpenuhi hajatnya. Selain itu,, QS Al-Hasy [59]:8 menjelaskan bahwa orang fakir yang berhijrah diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka, sehingga tidak memiliki apa-apa. Lainnya, peristiwa Nabi Musa dan Khaidir AS (QS Al-Kahfi [18]:79) di mana orang miskin dalam kisah tersebut memiliki kapal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja di laut, dan

bekerja di laut tentu lebih berat daripada di darat. Maka, tidak tepat kalau miskin lebih membutuhkan daripada fakir. Namun, sebagian Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat lain dalam kisah ini, di mana mereka hanya pekerjanya saja bukan pemilik kapal yang sesungguhnya.

Perbedaan pendapat ulama antara fakir dan miskin hanya sebatas pada siapa di antara mereka yang lebih berat keadaannya. Secara umum, seluruh ulama sepakat bahwa fakir dan miskin keduanya membutuhkan bantuan dan uluran tangan untuk memenuhi dasar hidupnya.

Upaya Pengentasan Kemiskinan

Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui pemberdayaan yakni upaya penciptaan kondisi structural yang mendukung kehidupan yang adil dan beradab, baik pada tataran individu, masyarakat, maupun Negara.

Berikut ini adalah pembahasan masing-masing tingkatan pemberdayaan.:

1. Individu

Sebelum kita dapat membantu mengentaskan kemiskinan pada pihak lain, maka pertama-tama kita sendiri harus memastikan bahwa kita tidak miskin. Analoginya, jika kita ingin membuat pandai pihak lain, maka kita sendiri harus pandai. Bekerja adalah satu-satunya cara agar kita sendiri terbebas dari kemiskinan. Telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam bagaimana beliau bekerja keras dengan berdagang dengan jujur dan dari berdagang tersebut mendapatkan hasil yang melimpah. Perlu diingat bahwa bekerja adalah perintah dari Al-Qur'an dan sekaligus akan meningkatkan harga diri.

Di dalam QS Ali Imran [3]:14 yang berbunyi: *“Dijadikan indah dalam manusia kesenangan kepada syahwat, berupa wanita, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup duniawi. Dan di sisi Allah tempat keculi yang baik,”* menunjukkan kepada kita semua tentang naluri manusia yang suka akan harta. Naluri inilah yang mendorong manusia bekerja untuk mendapatkan penghasilan, yang selanjutnya penghasilan tersebut dapat digunakan untuk membeli barang-barang kesukaan manusia. apabila untuk mendapatkan barang tersebut dia memilih mengharap belas kasihan orang lain, maka sejatinya itu di luar naluri manusia dan tidak ada harga diri yang bisa dibanggakan atas kepemilikan harta tersebut. Selain itu, Al Quran selalu mengajak kita untuk bekerja dan mengerjakan pekerjaan tersebut dengan penuh kualitas. Ini bisa dilihat dari QS Alam Nasyrah [94]: 7-8 yang berbunyi: *“Apabila engkau telah menyelesaikan satu pekerjaan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhanmu sajalah hendaknya kamu mengharap.”*

Bayangkan, ketika pelanggan meminta kepada kita untuk membuat produk yang sesuai keinginan pelanggan tetapi kita sebagai produsen tidak maksimal membuatnya, tentu pelanggan akan kecewa dan mungkin akan berpindah ke tempat lain, sehingga yang rugi adalah kita sendiri.

2. Masyarakat

Apabila setiap orang telah bekerja untuk dirinya sendiri dan keluarganya serta telah mempertimbangkan pendapatan setelah pension, maka kewajiban untuk pengentasan kemiskinan terhadap orang lain menjadi berkurang dengan cukup signifikan. Ini karena masing-masing individu telah mempersiapkan segala hal termasuk pada kondisi terburuk yaitu pemecatan kerja sehingga tidak ada pendapatan. Tetapi kondisi ideal tersebut berbeda dengan kenyataan. Fakta justru menunjukkan bahwa kemiskinan ada di sekitar kita dengan berbagai penyebabnya dan ini merupakan kewajiban kita.

Banyak orang tidak sadar bahwa masalah masalah social, termasuk di dalamnya kemiskinan adalah tanggung jawab setiap individu.

Dalam Al-Qur'an terkait dengan ini, bahwa ada hak dan kewajiban bagi setiap individu agar masalah kemiskinan ini terselesaikan. Orang-orang miskin mempunyai hak atas harta dari orang kaya. Hal ini bisa dilihat dalam QS Adz Dzariyat [51]:19 yang berbunyi: *"Dalam harta mereka ada hak untuk (orang miskin yang meminta) dan yang tidak berkecukupan (walaupun tidak meminta)."* Dari ayat ini jelas bahwa harta yang kita dapatkan dai usaha keras kita dalam bekerja tidak sepenuhnya merupakan harta kita. Artinya, di dalam harta kita, ada kewajiban kita untuk segera menunaikan hak-hak mereka.

Kewajiban tersebut tertuang dalam zakat seperti yang tertuang dalam QS At-Taubah [9]:60 *"Sesungguhnya zakat-zakat, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, muallaf, budak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang berpergian, sebagai sesuatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

Ayat ini dan juga ayat lain tentang anjuran sedekah, menunjukkan bahwa Islam adalah system yang lengkap dengan aturan bagaimana melakukan pengentasan kemiskinan. Bagi seseorang yang mempunyai harta lebih dari nishab maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Tetapi, selain itu, Islam juga membuka kesempatan bagi siapapun untuk membantu golongan miskin tanpa melihat berapa pendapatan yang dimilikinya. Apabila ini berlangsung dengan baik, dalam arti golongan kaya selalu rutin membayar zakat dan selalu menyumbang dengan jumlah yang signifikan dan konsisten, maka kemiskinan akan mudah teratasi.

3. Negara/Pemerintah

Pihak yang paling berkepentingan dalam pengentasan kemiskinan adalah pemerintah. Hal ini dijamin dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: *"Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara."* Pemerintah dalam hal ini harus mengalokasikan sejumlah dana untuk pengentasan kemiskinan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Telah disebut beberapa ayat di atas tentang mencari rezei untuk mengindari diri dari kemiskinan. Dengan seakin banyak rezeki, maka semakin jauh kita dari kemiskinan. Tetapi ini bukan berarti bahwa harta adalah salah satu indikator kekayaan. Selama ini, indikator kekayaan yang paling mudah adalah seberapa banyak seseorang punya set (fisik). Misalnya, seseorang yang punya beberapa rumah dan beberapa mobil maka orang tersebut dikatakan kaya. Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang lain tidak punya rumah dan mobil, maka dia disebut miskin. Hal tersebut bukanlah indikator kekayaan yang tepat. Kekayaan sebenarnya dalam hati dan kepuasan.

Seseorang yang punya banyak teman, maka sejatinya itulah kekayaan hati. Karena, ketika Ahmad sedang menghadapi masalah yang dia tidak bisa selesaikan, maka dia masih punya kekayaan lain yaitu teman-teman Ahmad. Mereka akan bahu membahu ikut membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Ahmad, baik dalam kontribusi materi maupun ide. Membantu menyelesaikan suatu permasalahan adalah sesuatu yang diajarkan dalam agama Islam: *"Sebaik-baik manusia adalah yang member manfaat kepada banyak orang."*

Selain kekayaan hai, kepuasan adalah salah satu bentuk kekayaan yang lain. Kepuasan yang dimaksud adalah kepuasan setelah melakukan aktivitas yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Misalnya, kepuasan yang timbul setelah seseorang berzakat untuk membantu fakir dan miskin. Kepuasan setelah memberikan ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas. Walaupun aktivitas ini tidak menambah kekayaan secara materi pada

dirinya justru dia yang mengeluarkan uang (kekayaan) kepada orang lain, tetapi aktivitas ini akan menimbulkan kepuasan yang tidak terhingga, dan inilah hakekat kekayaan dalam Islam.

Islam mengajarkan sikap Qana'ah yaitu sikap penuh ketenangan dalam menghadapi semua ini. Bisa juga diartikan rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang telah diusahakan darinya. Tentu tidak berarti bahwa seseorang tersebut menggunakan sikap qana'ah untuk bermalas-malasan. Tetapi, seseorang tetap berusaha keras dan berdoa dan diakhiri dengan tawakal, maka apapun yang kita terima, kita harus tetap qana'ah.

Selain qana'ah, sifat yang harus dimiliki seorang muslim adalah sifat wara' dan zuhud. Kedua sifat tersebut sering diungkapkan bersama-sama namun pada dasarnya berbeda. Al 'Utsaimin (2012:662) menyatakan bahwa wara' merupakan sikap seorang muslim meninggalkan hal-hal yang berbahaya dari perkara dunia. Sementara zuhud adalah sikap seorang muslim untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Zuhud lebih tinggi dari Wara', karena wara' sekedar meninggalkan hal yang berbahaya dan masih mengerjakan yang mubah (dibolehkan), sementara seorang yang zuhud hanya melakukan hal yang bermanfaat meskipun bisa saja seorang yang zuhud adalah orang yang kaya.

Al 'Utsaimin (2012) menyebutkan setidaknya ada dua manfaat yang didapatkan dari sifat zuhud apabila diamalkan sebagaimana termaktub dalam hadis ke-31 dalam kitab Arbain Nawawi, yaitu:

1. Kecintaan Allah apabila zuhud terhadap dunia
2. Kecintaan manusia apabila zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia lainnya

Pentingnya Perubahan Paradigma

Fakta di atas menunjukkan bahwa di berbagai sektor secara umum menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia pada khususnya, dan pemerintah di Negara Negara OKI pada umumnya, perlu meningkatkan sektor-sektor penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang berkualitas. Masalah pendidikan (literasi), kesehatan (infant mortality) dan masalah ekonomi (rasio GINI) masih perlu ditingkatkan kembali, guna mencapai suatu tingkat yang paling tidak mendekati indikator-indikator di Negara maju yang relative unggul di banyak sektor.

Fakta di atas juga menunjukkan bahwa Negara-negara muslim identik dengan kemiskinan. Kemiskinan yang dimaksud dalam hal ini bukanlah masalah ekonomi, tetapi juga kemiskinan terkait kesehatan dan juga pendidikan. Secara lebih terperinci, kemiskinan yang dimaksud meliputi keterbatasan ilmu pada ibu-ibu hamil akan pentingnya kontrol kandungan kepada dokter dan juga asupan gizi ibu dan bayi yang dikandungnya. Dalam hal ini berarti miskin ilmu pada ibu tersebut. Kemiskinan juga mencakup ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan jaminan layanan kesehatan pada masyarakat, terutama masyarakat pedalaman di suatu daerah terpencil. Juga meliputi kemiskinan atas pendidikan, dan lain sebagainya. Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan tidak hanya sebatas kebutuhan materi, namun juga mencakup keterbatasan ilmu dan kemampuan mereka mengakses ilmu tersebut, seperti kurangnya fasilitas dan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat miskin sehingga menghambat mereka untuk mengakses ilmu tersebut.

Dapat dipahami bahwa kemiskinan di atas akan dapat teratasi apabila tersedia cukup dana untuk mengatasi problem tersebut. Misalnya, pendirian puskesmas dan juga sekolah di lokasi yang sangat terpencil sehingga masyarakat setempat dapat menikmati sosialisasi pentingnya kesehatan oleh puskesmas, dan pada saat yang sama masyarakat tersebut bisa menimba ilmu di sekolah.

Dana yang besar tersebut tidak cukup hanya untuk membiayai gedung puskesmas dan juga gedung sekolah. Tetapi pemerintah juga harus mendukung pengobatan pasien dan gaji dokter-dokter dan perawat-perawat tenaga kesehatan yang ada. Begitu juga dalam bidang pendidikan yaitu gaji guru-guru, perlengkapan laboratorium, dan perpustakaan. Ebiuh jauh lagi, bidang pendidikan ini berbeda dengan bidang yang lain, misalnya bidang kesehatan. Bidang kesehatan hasilnya dapat terlihat dalam rupa kesehatan pasien (sebelumnya pasien dalam kondisi sakit), tetapi hasil dari pengeluaran pendidikan tidak bisa langsung terlihat sebagaimana masalah kesehatan di atas, tetapi hasilnya baru bisa terlihat puluhan tahun kemudian yaitu suatu manusia yang berkualitas, baik secara keilmuan dan spiritual yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perencanaan yang matang harus dilakukan.

Dalam melakukan perencanaan harus didahului dengan perubahan paradigma. Kemiskinan dipandang sebagai hasil dari produktivitas manusia yang rendah dan akumulasi dari pendidikan yang rendah sehingga menciptakan lingkaran kemiskinan (*poverty trap*). Padahal, kemiskinan seharusnya dilihat dari berbagai aspek (*multi-dimension*) yaitu kondisi nonmoneter, yakni: gizi buruk, tempat tinggal yang tidak layak, tempat tinggal yang tidak bersih, kekurangan air bersih, pembuangan sampah yang buruk, pendidikan yang rendah dan putus sekolah, dan kejahatan yang meningkat. Dengan kata lain, kemiskinan sebaiknya dipandang dari sisi pemenuhan hak setiap individu (*right-based approach*) bukan hanya dari pandangan *cost-based approach*.

Berdasarkan fakta di atas, tampak bahwa peranan pemerintah sangat besar dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor. Tetapi data menunjukkan bahwa *infant mortality* yang tinggi dan *health expenditure* yang rendah mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mampu untuk secara total melaksanakan pembangunan tersebut

Oleh sebab itu perubahan paradigma perlu dilakukan dari melihat bahwa pembangunan ekonomi dan social menjadi tanggung jawab pemerintah harus diubah menjadi tanggung jawab masyarakat yang secara umum terawasi dan terkontrol. Pemerintah harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat secara individual untuk dapat memberikan peran pada pembangunan jalan tol berbayar yang menghubungkan dengan satu kota ke kota lain. atau layanan kesehatan yang memadai di berbagai tempat terpencil bisa juga lembaga pendidikan di daerah tertinggal. Ekonomi islam telah memberikan jenis instrument yang dapat merealisasikan tujuan tersebut antara lain zakat dan wakaf.

Zakat adalah instrument ekonomi syariah memiliki pengertian dilihat dari aspek spiritual sebagai suatu bentuk pencucian diri dari sifat bakhil dan cinta harta serta menghindarkan manusia dari kesyirikan. Dari aspek social Zakat berorientasi untuk menciptakan harmonisasi kondisi social masyarakat, sedangkan dari aspek ekonomi zakat bermanfaat untuk menghindari penumpukan harta pada segelintir orang, mendistribusikan harta secara adil dan merata, mensejahterakan kaum lemah serta diharapkan menghasilkan tatanan pembangunan ekonomi yang harmoni.

Wakaf merupakan sedekah dari individual yang pokoknya tidak boleh habis. Gabungan dari individual kaya bisa mendirikan rumah sakit wakaf atau mendirikan sekolah segala perlengkapannya melalui wakaf, dengan demikian akan mengatasi berbagai masalah penyebab utama terjadinya kemiskinan masyarakat sebagaimana diuraikan di atas.

Pengelolaan zakat dan wakaf yang efektif untuk Kesejahteraan

Peran zakat terhadap perekonomian tidak dengan serta merta atau otomatis akan menambah kesejahteraan. Dampak zakat bagi perekonomian tidak bisa semata dapat dijelaskan secara normative, namun juga secara empirik.

Sebagai contoh, efek zakat terhadap konsumsi dapat berdampak positif ataupun negative. Demikian pula dampak zakat terhadap tabungan dan investasi nasional, dampak zakat bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Oleh karena itu, untuk menghindari adanya efek kemubaziran dari pelaksanaan zakat, atau bahkan efek negatifnya, serta meningkatkan efek positif zakat bagi kesejahteraan umat, maka zakat harus dikelola dengan baik dan terencana. Pengelolaan zakat tidak bisa semata diserahkan kepada amil swasta yang tidak mampu bekerja secara professional. Intervensi pihak ketiga, misalnya pemerintah, perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat.

Tata kelola atau governance secara singkat dapat diartikan sebagai suatu system dan proses yang bisa memastikan arah secara keseluruhan, efektivitas, pengawasan dan akuntabilitas organisasi. Setidaknya, ada lima prinsip tata kelola yang baik, yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, organisasi dikelola dengan baik dan efisien, masalah-masalah diidentifikasi di awal dan ditangani dengan tepat, pelestarian reputasi dan integritas sektor, dan zakat ini dikelola secara professional dan unik serta memberikan nilai tambah yang lebih maju.

Seperti gambaran umum, tata kelola zakat ini setidaknya melibatkan peran amil, muzaki, mustaqid dan pemerintah. Beberapa hal pokok yang perlu mendapat perhatian dalam tata kelola zakat dapat digambarkan di bawah ini. Secara singkat, gambar ini menjelaskan bahwa dalam pengelolaan zakat yang efektif dan efisien, amil atau lembaga pengelola zakat harus mempertimbangkan empat aspek, aspek kondisi dan perilaku muzaki, kondisi dan perilaku perusahaan muzaki, keterlibatan regulator dan pengawasan dan keadaan social ekonomi masyarakat.

Tabung Wakaf Indonesia

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) merupakan badan otonom yang merupakan bagian dari jejaring institusi pengelola zakat Dompot Dhuafa Republika yang berdiri pada 14 Juli 2005. TWI merupakan lembaga berbadan hukum yayasan dan telah terdaftar sebagai *nazhir* wakaf di Indonesia. Tujuan dari pendirian lembaga ini adalah mewujudkan sebuah lembaga nazhir wakaf dengan model seperti lembaga keuangan yang dapat melakukan mobilisasi perhimpunan asset wakaf dan memenuhi kebutuhan masarakat (Rozalinda, 2015:249)

Pada tahun 2008, TWI mencatat penyaluran wakaf uang mencapai Rp. 10.031.099.801,00. Peruntukan dari wakaf uang yang dikumpulkan TWI ialah untuk operasional dari beberapa program:

1. Sektor pendidikan, mencakup:
 - a. Smart Ekselensia
 - b. Rumah Cahaya
2. Sektor kesehatan, mencakup LKC
3. Sektor dakwah, mencakup wisma muallaf
4. Sektor ekonomi

Pemberdayaan yang dilakukan TWI pada bidang ekonomi memiliki jangkauan cukup luas, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Wakaf Peternakan
- b. Wakaf Perkebunan
- c. Wakaf Usaha Perdagangan

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Kemiskinan dapat diukur secara absolute atau relatif. Dengan pendekatan absolute, pada umumnya keiskinan diukur dari pendapatan per kapita, seperti pendapatan per kapita US\$1,25. Secara relatif, kemiskinan diukur dari berbagai dimensi. Berbagai institusi mengukur kemiskinan dengan dimensi yang bisa berbeda, seperti BPS menggunakan konsep kebutuhan Fisik Minimum, BKKBN menggunakan pendekatan ekonomi dan social keluarga, dan UNDP juga menggunakan indeks kemiskinan multidimensi (MPI).
2. Dalam pandangan Islam, definisi dan pengukuran kemiskinan terus berkembang. Pada awalnya miskin dimaknai dari aspek kemampuan pendapatan dan kemampuan mencari nafkah. Dalam perkembangan kontemporer, para sarjana muslim mengukur keiskinan dengan indicator yang lebih komprehensif, seperti aspek masalah, atau aspek material dan spiritual. Kelemahannya belum ada data makro yang mendukung sehingga diperlukan survey untuk mengetahuinya.
3. Sudah menjadi keyakinan ekonom, bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang harus diatasi dalam pembangunan suatu Negara. Berbagai strategi juga telah diusul dan diterapkan untuk menekan kemiskinan
4. Islam telah memiliki instrument yang bersumber dari ajaran syariat untuk mengatasi kemiskinan, seperti kewajiban zakat sunah bersedekah, infak dan wakaf ataupun instrument lainnya seperti pelarangan riba dan judi. Secara mikro telah banyak dibuktikan manfaat zakat untuk mengatasi kemiskinan di berbagai Negara.
5. Pengelolaan zakat maupun wakaf sebaiknya oleh masyarakat melalui badan tertentu yang sudah ditetapkan dan diawasi oleh pemerintah, diperlukan SDM pengelola yang amanah dan memahami hukum ekonomi yang berbasis syariah (Al Quran dan Hadist), serta tata kelolanya transparan sehingga tepat sasaran baik untuk individu maupun mendukung pembangunan ekonomi Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Utsaimin , Shalih Bin Muhammad, Syaikh Muhammad, Fatwa-Fatwa Zakat, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008
- Bank Indonesia, Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2016
- Mughniyah, Muhamad Jawad. 2005. Al-fiqh “ala al-Madzahib al-Khamsah. Penerjemah Masykur AB dkk. Judul Indonesia: Fiqih Lima Mazhab. Cet. 14. Jakarta: Lentera.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Pasal. 34 Tahun 1945 Tentang Hak Untuk Fakir Miskin dan Anak Terlantar.
- Rozalinda. 2015. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.